



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 304 /II.03/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peningkatan kewaspadaan di daerah sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi antara Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur masyarakat lainnya sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/0786 D.II tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. untuk menjaring, menampung, dan mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk Sekretariat Forum yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19.01.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
- Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
- Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/304/II.03/HK/2014
TANGGAL : 3 - April - 2014

**DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
2. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
7. Kepala Kantor Imigrasi Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/309/II.03/HK/2014
 TANGGAL : 3 - April - 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM FKDM | BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP) | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sutan Syahrir, S.Oe., SH (Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung (FOKMAL)) | Ketua | 250.000 | Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19.01. |
| 2. | Supriyadi Alfian (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung) | Sekretaris | 200.000 | |
| 3. | Prof.Dr.Ir.Sugeng P Haryanto,Msi (Rektor Unila) | Anggota | 175.000 | |
| 4. | H. Mawardi AS (Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 5. | Nurfaiv Chaniago (Ketua Muhammadiyah Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 6. | Drs. Hi. Sefli Ilyas (Ketua Harian Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL)) | Anggota | 175.000 | |
| 7. | Heru Karwaji, S.IP (Ketua Dewan Harian 45 Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 8. | Drs.H. M Bahruddin, MA (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 9. | Ir. H.Aryodhia Febriansa. SZP, SH (Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 10. | Kurniati (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 11. | Bedjo Dewangga (Dir. Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 12. | Suhardi (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |

| | | | | |
|-----|---|---------|---------|--|
| 13. | Hendarsyah Damiri, SH (Sekretaris Majelis Petimbangan Karang Taruna Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 14. | Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 175.000 | |
| 15. | Dir. Intelkam Polda Lampung | Anggota | 175.000 | |
| 16. | Kasi. Intel Korem 043 Garuda Hitam | Anggota | 175.000 | |
| 17. | Analisis dan Evaluasi pada Badan Intelijen Negara Daerah Lampung | Anggota | 175.000 | |
| 18. | Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung | Anggota | 175.000 | |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 34/II.03/HK/2014
 TANGGAL : 3 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP) | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung | Ketua | 250.000 | Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19.01 |
| 2. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung | Sekretaris | 200.000 | |
| 3. | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 175.000 | |
| 4. | Kepala Sub Bidang Pengkajian Politik dan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 175.000 | |
| 5. | Kepala Sub Bidang Pengkajian Sosial, Ekonomi, Budaya dan HAM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 175.000 | |
| 6. | Sersan Mayor Ikhwanudin (Unsur Intel Korem 043 Gatam) | Anggota | 175.000 | |
| 7. | Gustina (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 8. | Sukrismana, S.Sos (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 9. | Murni, S.IP (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 10. | Nurdiansyah Adi, SH (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 11. | Deki Kurniawan, S.Sos (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 12. | Mira Fitriana, S.AN (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 13. | Umi Musyafa'atur Rifatin (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |

| | | | | |
|-----|--|---------|---------|--|
| 14. | Asmawi (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 15. | Sulisdianto (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 16. | Jamaluddin (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 17. | Romli (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 18. | Vierzain, S.Fil.I (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.